

PERANAN PERENCANAAN ANGGARAN DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PINRANG

The Role of Budget Planning in Enhancing Development in Pinrang Regency

Muh. Ridwan¹, Muhammad Hatta², Muhammad Nur³

Email : muhrdwangazali@gmail.com

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstract

This study aims to understand the role of budget planning in enhancing development in Pinrang Regency. The research employs a qualitative descriptive method. Data collection techniques include data reduction, data presentation, data interpretation, and conclusion drawing. The subjects of this study are employees at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Pinrang Regency who are knowledgeable about budget planning and regional development enhancement. The results of the study indicate that the government's budget or Regional Budget (APBD) plays a crucial role in planning and controlling development, serving as a guide in planning and managing local government development programs. This is evident in the process of program and budget formulation carried out by the Pinrang Regency government using a bottom-up system approach, which begins with program and budget planning from the lowest level of government structure, namely the village, up to the highest level, the regency government.

Keywords: *Role of Budget Planning, Development Enhancement, BAPPEDA*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan perencanaan anggaran dalam peningkatan pembangunan di kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di Kantor BAPPEDA Kabupaten Pinrang yang paham tentang rencana penganggaran dan peningkatan pembangunan daerah. Hasil penelitian diperoleh bahwa: anggaran pemerintah atau APBD mempunyai peran yang penting dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan yaitu sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengendalikan program pembangunan pemerintah daerah. Hal itu dapat dilihat pada proses penyusunan program dan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan system bottom up, yaitu perencanaan program dan anggaran yang dimulai dari struktural pemerintahan yang paling rendah yakni desa sampai pada struktural tertinggi yakni pemerintah daerah kabupaten.

Kata Kunci : Peran Perencanaan Anggaran, Peningkatan Pembangunan, BAPPEDA

PENDAHULUAN

. Terkait dengan pencapaian pembangunan secara nasional, daerah juga memiliki hasil-hasil pembangunan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, dikarenakan dokumen perencanaan di daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya (pemerintah Provinsi dan Pusat). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwasanya suatu Anggaran Daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam proses penyusunan sampai disahkannya APBD berpedoman pada dokumen perencanaan daerah. Proses terbentuknya dokumen perencanaan melalui perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat merupakan perencanaan melalui pendekatan partisipatif, hal tersebut merupakan syarat mutlak dalam penyusunan perencanaan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk menghasilkan perencanaan yang efektif dari setiap kegiatan pembangunan diperlukan sumberdaya manusia yang bukan hanya sanggup bekerja keras, tetapi lebih mampu bekerja secara profesional, dan memiliki kemampuan yang lebih handal. Dalam hal ini, seorang perencana selain memiliki kemampuan kerja keras, tetapi perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga menghasilkan hasil karya yang optimal dan berkelanjutan. Selain perencanaan pembangunan daerah, dalam konteks otonomi daerah, perencanaan anggaran belanja daerah atau perencanaan penganggaran daerah, merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan keberlangsungan dan kesuksesan pembangunan daerah. Ini berarti kedua aspek tersebut sangat penting dan perlu bersinergi guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Perencanaan dan penganggaran sektor publik memiliki keunikan atau karakteristik yang lain dibanding organisasi non publik (korporasi). Dalam perencanaan dan penganggaran sektor publik isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran seperti partisipasi, kesenjangan anggaran, loyalitas kinerja dan dimensi lainnya, telah menarik banyak peneliti dan ilmuwan untuk melakukan diskusi secara mendalam, salah satunya terkait dengan perilaku aparat. Perilaku aparat turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah.

Anggaran mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku manusia, sebaliknya perilaku manusia memiliki dampak yang luas dalam pengelolaan anggaran dan alokasi anggaran. Anggaran memberikan informasi kepada manusia mengenai apa yang diharapkan dan kapan harus dilaksanakan. Anggaran memberikan batasan mengenai apa yang boleh dibeli dan seberapa banyak yang boleh dibeli. Manusia juga berharap dari jumlah anggaran yang akan dan yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan akan datang.

Disini lain dengan penganggaran yang jelas paling tidak membatasi ruang gerak seseorang. Kusuma, (2004) menegaskan anggaran membatasi ruang gerak manusia. Hal ini menandakan dalam perencanaan dan penganggaran perlu di susun dengan cermat. Penyusunan anggaran merupakan bagian dari proses anggaran. Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang bersifat teknis. Kata-kata seperti keuangan, angka, estimasi muncul ketika seseorang berpikir mengenai anggaran. Tetapi, dibalik seluruh citra teknis yang berkaitan dengan anggaran, terdapat manusia. Manusia yang menyusun anggaran dan manusia jugalah yang harus hidup dengan anggaran tersebut (Ikhsan dan Ishak, 2005).

Menurut hamat sangat cukup beralasan bila dalam perencanaan dan penganggaran faktor keperilaku harus dicermati dan dipertimbangkan, tentu saja perlu mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah, termasuk potensi daerah.

Pinrang, Infopublik - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pinrang, mengharapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Pinrang tahun 2017 yang sebentar lagi akan diajukan ke DPRD harus efisien, efektif dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya hal ini sangat penting karena menjadi semangat dan prioritas pembangunan dalam hal pengembangan Infrastruktur.

Peningkatan pelayanan publik, pengurangan rumah tangga miskin, penerapan electronic Government (e-gov) sampai kepada pengembangan SDM para Aparatur Sipil Negara, yang kesemuanya bermuara untuk kepentingan masyarakat Bumi Lasinrang.

Atas asas itu lanjut mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengajukan anggaran di APBD-P untuk menghindari pengadaan sarana prasarana kantor, kendaraan dinas, alat tulis kantor (ATK), anggaran makan minum dan

beberapa item yang dianggap tidak mendesak dan efisien. “Penekanan APBD-P ini sangat jelas dengan outcome untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Harapan Bupati Pinrang untuk penerapan sistem Elektronik Government juga menjadi alasan pengadaan ATK harus seminim mungkin.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif Penelitian ini dilaksanakan di BAPEDDA Kab.Pinrang, Waktu penelitian di laksanakan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu di mulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah person, paper dan place. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu menguraikan perencanaan penganggaran dan pembangunan daerah. Menurut Miles dan Huberman (2014:22), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan) dan bagan. Intepretasi data yakni menjelaskan data – data yang di gunakan dan telah diambil pada lokasi penelitian, mengintepretasi dalam bentuk pembahasan yang dijelaskan oleh peneliti dari objek penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan program dan anggaran yang dilakukan pada Kabupaten Pinrang merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan, karena antara program dan anggaran harus sinkron agar tujuan pembangunan daerah dengan segala prioritasnya sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Maka, dalam penyusunan anggaran yang dilakukan pada BAPPEDA Kabupaten Pinrang harus didahului dengan proses penyusunan rencana pembangunan secara garis besarnya dengan tujuan program yang secara detailnya diprogramkan dalam rencana anggaran pada tiap satuan kerja tetap mengacu pada garis besar rencana pembangunan tersebut.

Oleh karena itu, proses penyusunan program dan anggaran tersebut termasuk dalam satu proses penganggaran. Jadi sebelum membuat anggaran, pemerintah harus melalui proses seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang menjelaskan tentang proses penyusunan program pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Renstra Daerah).

Setelah melalui proses penyusunan rencana tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), namun sebelumnya pemerintah daerah harus membuat Arah dan Kebijakan Umum (AKU APBD) yang sekarang disebut dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang didasarkan atau berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. KUA disusun sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD.

Permasalahan dan isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian indikator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian indikator TPB menjadi fokus perhatian dalam konteks keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target dijadikan sebagai baseline yang mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Sehingga dengan sendirinya permasalahan dan isu strategis diterjemahkan dari indikator yang belum mencapai target tersebut.

Adapun pada periode RPJMD selanjutnya indikator TPB yang tidak mencapai target dapat berbeda sesuai dengan hasil kajian pencapaian TPB, dan menjadi fokus pada kesempatan lain. Sementara untuk indikator TPB yang telah mencapai target, belum dilaksanakan dan belum ada data bukan berarti diabaikan, namun tetap diperhatikan dalam pencapaiannya ke depan,

dilaksanakan dan diupayakan pemenuhan datanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Pinrang 2019 – 2024, 17 tujuan dalam TPB /SDG's ditetapkan 11 tujuan yang menjadi fokus perhatian pada RPJMD 2019–2024.

Selain menetapkan isu strategis, berdasarkan hasil kajian capaian TPB di Kabupaten Pinrang, maka ditetapkan juga skala prioritas. Skala prioritas dimaksudkan untuk mengarahkan prioritas pembangunan di Kabupaten Pinrang sehingga mendapatkan perhatian yang lebih dalam hal penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan penganggarnya. Kriteria pada penetapan skala prioritas daerah didasarkan pada pertimbangan besarnya GAP indikator TPB antara capaian dan target, standar pelayanan minimal (SPM) dan keterkaitan dengan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa permasalahan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pinrang belum mencapai target nasional dikarenakan masih terdapatnya indikator TPB yang belum dicapai. Untuk itu indikator TPB yang belum mencapai target tersebut akan dibuatkan alternatif skenario pencapaian TPB-nya. Hasil perumusan alternatif skenario tersebut akan diikuti dengan rumusan-rumusan kebijakan, rencana dan program yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Anggaran pemerintah atau sering disebut dengan APBD mempunyai peran yang penting dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan yaitu sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengendalikan program pembangunan pemerintah daerah. Hal itu dapat dilihat pada proses penyusunan program dan anggaran (penganggaran) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan system bottom up, yaitu perencanaan program dan anggaran yang dimulai dari struktural pemerintahan yang paling rendah yakni desa/ kelurahan sampai pada struktural yang tertinggi daerah yakni pemerintah daerah kabupaten melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah daerah memberikan pengetahuan dan arahan kepada struktural pemerintahan dibawahnya tentang perencanaan dan pengendalian pembangunan, terutama ditingkatdesa.
2. Hendaknya tiap SKPD sebagai perencana, pelaksana dan pengendali pembangunan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tepat. Agar anggaran pemerintah daerah yang terbatas dapat digunakan secara efektif untuk membiayai program pembangunan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Askam Tuasikal. 2017. Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah.

- Arfan, Ikhsan dan Ishak Muhammad. 2005. Akuntansi Keprilakuan. Salemba Empat. Jakarta
- Agus Rianto dan Dyah Mutiarin. 2017. Dengan hasil penelitian yakni Tingkat konsistensi selama tiga tahun dari tahun 2013, 2014, tahun 2015 pada bidang fisik dan prasarana SKPD DPU. Magister Ilmu Pemerintahan
- Dolli Siska Rani. 2019. Peranan Anggaran, Perencanaan Pembangunan, Pengendalian Pembangunan, Desa.
- Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro. 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Hendra. 2004. MANAJEMEN PRODUKSI, Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Andi, Yogyakarta.
- Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Namira Osrinda dan Arman Delis. 2016. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Program Studi Ekonomi Pembangunan.
- Nafarin, M. 2013. Penganggaran Perusahaan. Jakarta : Salemba Empat.
- Nitisastro, Widjojo. 2014. Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro. Jakarta: Penerbit Kompas
- Ratih Ayu Tirta Anggalih. 2018. Analisis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Talud Penahan Longsor (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Di Desa Lerep Kabupaten Semarang). Mahasiswi Ilmu Pemerintahan
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami. Yogyakarta: PT Pustaka Baru
- Sasongko, Catur dan Parulian, Safrida Rumondang. 2013. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Subandi. 2011. "Ekonomi Pembangunan". Bandung: Alfabeta
- Mahardika, I Gusti Dan Artin, 2014 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang 2021
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Yuwono, Sony dkk. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). Malang: Bayumedia Publishing